

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara kepada Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya

Menurut Teori Mirelle's Grindle yang dimaksud meliputi :

Isi Kebijakan :

1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

Dalam melakukan proses Implementasi program perlindungan dan rehabilitasi sosial tersebut, sudah sejauh mana tolak ukur keberhasilan tersebut ?

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Manfaat apa saja yang didapatkan oleh para penerima manfaat dari hasil perlindungan dan rehabilitasi sosial ini ?

3) Derajat perubahan yang diinginkan

Apakah tujuan kebijakan yang dilakukan tercapai seperti derajat perubahan yang diinginkan?

4) Tempat Pengambilan Keputusan

Sejauh mana lokasi pengambilan klien untuk program ini berjalan ?

5) Pelaksanaan program

Seperti apa Pelaksanaan program yang dijalankan oleh implementor dalam penanganan anak nakal sebagai penerima manfaat?

6) Sumber daya yang digunakan

Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam Pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial di UPT Marsudi Putra Surabaya ?

Konteks Kebijakan :

1) Kekuasaan dan Strategi aktor yang terlibat

Apakah terdapat kebijakan tersendiri / S O P tersendiri untuk program pembangunan perlindungan dan rehabilitasi social bagi anak-anak tersebut?


2) Karakteristik lembaga dan pengguna

Bagaimana Unit Pelaksanaan Teknis mendapatkan dukungan dari institusi dan rezim yang berkuasa dalam menjalankan perlindungan dan rehabilitasi ?

3) Kepatuhan dan daya tanggap Pelaksanaan

Apakah pihak UPT Marsudi Putra Surabaya konsisten dalam menjalankan perlindungan dan rehabilitasi tersebut ?

SURAT KETERANGAN IZIN RISET



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
 SURABAYA – (60189)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/ 2967 /209/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya
 Nomer : 988/K/FISIP/III/2023 Tanggal : 15 Maret 2023

Nama : **APRILIA ROSA**

Alamat : Tambak Asri 12/119, RT 005 / RW. 006, Kel. Morokrengan, Kec. Krengan, Kota Surabaya

Nomor Telepon : 082333157565

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Judul Penelitian : "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Dengan Pengembangan Kewirausahaan di Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya"

Bidang Penelitian : Mencari data, Wawancara, Skripsi / Administrasi Negara

Lokasi Penelitian : Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya


Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan

Status Penelitian : Baru


Anggota Tim Penelitian : -

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Surabaya
 Pada Tanggal : 24 Maret 2023

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Sekretaris

NURUL ANSORI, S.Pd, M.Kes
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19700204 200012 1 006

Tembusan :
 Yth. Walikota Surabaya
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP



Dipindai dengan CamScanner

SURAT IZIN PENELITIAN BAKESBANGPOL



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Gayung Kebonsari No. 56 B - Tlp./Fax. (031) 8290794 – 8296515 Kode Pos 60235
Website : <http://dinsos.jatimprov.go.id> E-mail : dinsosiatim56b@gmail.com
SURABAYA

Surabaya, 28 Maret 2023

Nomor : 700/775/107.1.01/2023 Kepada
Sifat : Blasa Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Lampiran : - Ilmu Politik Universitas 17 Agustus
Perihal : Surat Permohonan Observasi 1945 (UNTAG) Surabaya.

Di
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 14 Maret 2023 Nomor : 0982/K/FISIP/III/2023 dan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Timur Nomor : 070/2770/209/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan ijin kepada :

NO	NAMA/NO HP	NIM	PROGRAM STUDI
1.	APRILIA ROSA 082333157565	1111900001	ADMINISTRASI NEGARA

Untuk melaksanakan Observasi di UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, mulai tanggal 3 April – 3 Juli 2023 dengan Judul "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Jalanan Dengan Pengembangan Kewirausahaan".

Selanjutnya setelah selesai pelaksanaan Izin Penelitian dimaksud agar melaporkan hasil dan sejenisnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris


SUKARDI, S.H., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680510 198803 1 005

Tembusan :
Kepala UPT. Perlindungan & Rehabilitasi
Sosial Marsudi Putra Surabaya.

**SURAT IZIN PENELITIAN DINAS SOSIAL PROVINSI JATIM
DOKUMENTASI**

Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Kepala Seksi atas nama Bapak Sukur wawancara terkait dengan proses implementasi perlindungan dan rehabilitasi sosial di UPT Marsudi Putra Surabaya



Sumber : Dokumentasi Penelitian di UPT Marsudi Putra (3-April-2023)

**KEPALA SEKSI PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI
SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA**



Sumber : Dokumentasi Penelitian di UPT Marsudi Putra (3-April-2023)
PEKSOS PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
MARSUDI PUTRA SURABAYA



Sumber : Dokumentasi Penelitian di UPT Marsudi Putra (11-April-2023)

PENGELOLA PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI
SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA



Sumber : Dokumentasi Penelitian di UPT Marsudi Putra (17-April-2023)

ADMINISTRASI UMUM SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KESSOS
DINSOS JATIM



Sumber : Dokumentasi Penelitian di UPT Marsudi Putra (3-April-2023)

LAS



Sumber : Dokumentasi Penelitian di UPT Marsudi Putra (3-April-2023)

PENERIMA MANFAAT LAS



Sumber : Dokumentasi Penelitian di UPT Marsudi Putra (3-April-2023)

PENERIMA MANFAAT BENGKEL



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

- 62 -

- g. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso, meliputi:
1. Kabupaten Probolinggo;
 2. Kabupaten Bondowoso; dan
 3. Kota Probolinggo.

BAB XVI
UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
MARSUDI PUTRA SURABAYA

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

[3] Dalam hal

- 63 -

- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 80

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan seleksi calon klien;
- c. pelaksanaan pelayanan sosial;
- d. pelaksanaan perlindungan sosial;
- e. pelaksanaan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
- g. pelaksanaan konsultasi pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;

i. penyiapan

- 64 -

- i. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- j. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi anak nakal yang dinyatakan sembuh secara psikososial;
- k. pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang telah menjalani putusan hukum;
- l. pelaksanaan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 82

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial;

b. melaksanakan

- 65 -

- b. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
 - c. melaksanakan pendampingan sosial klien;
 - d. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar klien;
 - e. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. melaksanakan assesment terhadap klien;
 - d. melaksanakan penempatan klien dalam program rehabilitasi sosial;
 - e. melaksanakan pembahasan kasus klien;
 - f. melaksanakan konsultasi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga atau masyarakat;
 - g. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, terapi psikososial, dan keterampilan;
 - h. melaksanakan advokasi sosial;
 - i. menyiapkan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - j. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi anak nakal yang dinyatakan sembuh secara psikososial;

k. melaksanakan

- 66 -

- k. melaksanakan teknis pemulangan/rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang telah menjalani putusan hukum;
- l. menyiapkan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XVII
BALAI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
SIDOARJO

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

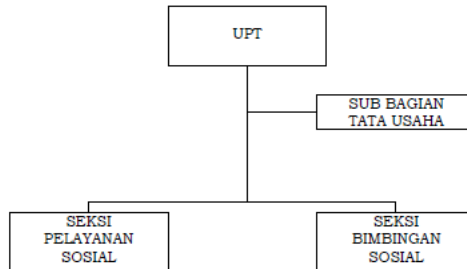
Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

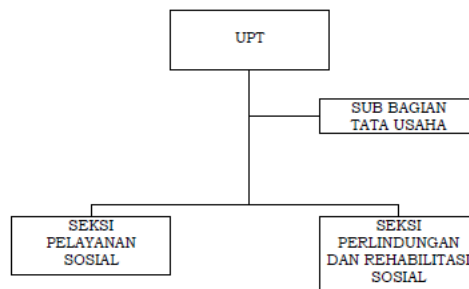
(2) Sub Bagian

- / -

M. BAGAN STRUKTUR UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA



N. BAGAN STRUKTUR UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttt

Dr. H. SOEKARWO



Madika: Jurnal Governance dan Kebijakan Publik
Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

(ISSN Online: [2775-6947](#) | ISSN Print: [2775-8079](#))

Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

LETTER OF ACCEPTANCE

Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Aprilia Rosa, Rachmawati Novaria, Eddy Wahyudi

Dengan Hormat, Berdasarkan artikel saudara yang diajukan ke redaksi jurnal Madika: Jurnal Governance dan Kebijakan Publik Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penerima Manfaat Di Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya”***

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan dewan dewan redaksi memutuskan jika artikel saudara telah layak dimuat dalam jurnal Madika: Jurnal Governance dan Kebijakan Publik. Kemudian artikel akan diterbitkan 26 Juni 2023 pada Vol. 3 , No 1, (2023) yang akan datang.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan trima kasih

Palu, 8 Mei 2023

Editor Chief

Sunardi, S.IP., MPA

NIP. 199110062020121004

Jurnal april

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
2	repository.unsri.ac.id Internet Source	1 %
3	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	1 %
4	www.researchgate.net Internet Source	1 %
5	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
7	id.123dok.com Internet Source	1 %
8	ejournal.insuriponorogo.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %

10	id.scribd.com Internet Source	<1 %
11	publikasi.unitri.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
14	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
15	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
16	dinsos.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
17	infocovid19.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
18	sipeg.unj.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.aksiologi.org Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
21	core.ac.uk Internet Source	<1 %

22	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
23	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
25	Faizzatun Nazira, Ertien Rining Nawangsari. "Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	<1 %
26	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
27	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
30	repository.uncen.ac.id Internet Source	<1 %
31	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %

32	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
34	sweetyhome.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
36	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
37	sipedo.upi.edu Internet Source	<1 %
38	www.tokobukualamin.com Internet Source	<1 %
39	adoc.pub Internet Source	<1 %
40	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
41	pepsic.bvsalud.org Internet Source	<1 %
42	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

44	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.scribd.com Internet Source	<1 %
46	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
47	www.businessperspectives.org Internet Source	<1 %
48	ijsshr.in Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On